

## ABSTRAK

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi isu yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Tasikmalaya merupakan persoalan sosial yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah Gepeng di Tahun 2024, capaian tersebut lebih mencerminkan keberhasilan secara kuantitas daripada jaminan adanya penanganan yang menyentuh akar permasalahan secara berkelanjutan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi Perda mampu memberikan solusi yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar menurunkan angka secara statistik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Analisis Kebijakan Publik oleh William Dunn dengan bentuk analisis Retrospektif yang analisisnya berorientasi pada analisis aplikasi berupaya memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu program, yang di dapatkan melalui Pendekatan Empiris untuk melihat bagaimana fakta dan Pendekatan Valuatif sebagai penilaian terhadap efektivitas dan kesesuaian implementasi Peraturan Daerah dengan tujuan yang ditetapkan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dan *snowball sampling* yaitu pengumpulan data yang jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam. Validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek suatu informasi yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 telah dilaksanakan melalui program seperti Penjangkauan, Permakanan, Bimbingan Sosial, Reunifikasi Keluarga dan Rujukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Kemudian penertiban yang telah dilakukan oleh Dinas oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena kendala keterbatasan anggaran, belum tersedianya fasilitas rumah singgah dan masih terdapat pendatang Gepeng dari luar daerah Kota Tasikmalaya. Sehingga gelandangan dan pengemis kembali turun ke jalanan. Selain itu, adanya indikasi relasi patronase dalam praktik implementasi kebijakan di lapangan. Hubungan informal antara pengatur wilayah dan aparat pelaksana dalam proses penertiban yang berakibat pada pembiaran gelandangan dan pengemis. Permasalahan yang masih berkelanjutan ini seharusnya menjadi dorongan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih memprioritaskan kelompok masyarakat rentan terutama dalam hal ini gelandangan dan pengemis sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan dan Pengemis.**

## **ABSTRACT**

*People with Social Welfare Problems (PMKS) remain a complex issue in various regions across Indonesia. The phenomenon of homelessness and begging (Gepeng) in Tasikmalaya City is a social problem regulated by Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the Management of People with Social Welfare Problems. Although data shows a significant reduction in the number of beggars by 2024, this achievement reflects quantitative success rather than a guarantee of sustainable, root-based solutions. This research is crucial to assess the extent to which the implementation of the Regional Regulation provides sustainable solutions, not simply a statistical reduction.*

*The theory used in this research is William Dunn's Public Policy Analysis theory, which uses a retrospective approach. Its application-oriented analysis attempts to account for various factors influencing the success or failure of a program. This approach is derived through an empirical approach to examine the facts and a valuation approach to assess the effectiveness and suitability of the implementation of the Regional Regulation to its stated objectives. The sampling technique used was purposive sampling, where individuals are considered most knowledgeable about the research objectives, and snowball sampling, where a small number of data are collected over time. Data collection techniques in this study included observation, documentation, and in-depth interviews. Data validity was achieved through source triangulation, which involves cross-checking the information obtained.*

*The research findings indicate that the implementation of Tasikmalaya City Regional Regulation Number 10 of 2017 has been implemented through programs such as Outreach, Food, Social Guidance, Family Reunification, and Referrals by the Tasikmalaya City Social Service. Furthermore, enforcement efforts have been carried out by the Department of Public Order (Satpol PP). However, the implementation of this policy has not been fully optimal due to budget constraints, the lack of shelter facilities, and the continued presence of homeless people from outside Tasikmalaya City. This has resulted in homeless people and beggars returning to the streets. Furthermore, there are indications of patronage relations in the implementation of the policy on the ground. The informal relationship between regional regulators and implementing officers in the process of regulation which results in the neglect of vagrants and beggars. This ongoing problem should be an encouragement for the Tasikmalaya City Government to prioritize vulnerable community groups, especially in this case vagrants and beggars as people with social welfare problems.*

**Keywords : Policy Implementation, People with Social Welfare Problems, Homeless People and Beggars.**